

## BAB IV

### STRATEGI HRWG DALAM MEMPENGARUHI PEMERINTAHAN

#### INDONESIA DALAM KTT ASEAN 2011

Advokasi adalah strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan pada saat penetapan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut masyarakat. Advokasi merupakan alat yang ampuh untuk mempengaruhi kebijakan di negara demokratis seperti Indonesia, misalnya masyarakat dan wakilnya membutuhkan individu-individu yang memiliki pengetahuan, komitmen dan kepedulian untuk mengangkat isu-isu yang ada tepat sasaran. Dengan menyuarakan kepedulian baik secara perseorangan dan kolektif hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang menyangkut masyarakat.<sup>59</sup>

Seiring perkembangan Hak Asasi Manusia mekanisme HAM ditingkat regional menjadi salah satu aspek penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM, seperti pada kawasan Eropa, Amerika, Afrika, termasuk pula kawasan ASEAN. Dalam konteks ASEAN perjuangan Hak Asasi Manusia tidak lepas dari pembangunan berkelanjutan selama 16 tahun yang melibatkan masyarakat sipil didalam prosesnya. Keterlibatan masyarakat sipil dalam mekanisme regional mampu mewujudkan perlindungan dan pemajuan HAM dikawasan tertentu bahkan secara produktif dan konstruktif masyarakat sipil mampu berkerjasama dengan badan HAM baik di tingkat pemerintah, NGO lokal, regional dan internasional.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> <http://www.unicef.org/indonesia/id/BukuPanduan-Pendahuluan.pdf> 3 Maret 2013

Dalam menjalankan fungsi dan mandatnya HRWG juga banyak melakukan kerjasama untuk mendukung dan membentuk satu suara dalam HAM, media massa merupakan merupakan media paling jitu untuk menyuarakan HAM, pelaporan perkembangan, kemajuan dan isu yang sedang terjadi. Selain media massa yang di gunakan HRWG untuk mendukung kinerjanya, pemanfaatan privileg yang dimiliki HRWG untuk serta mendukung program tujuan HRWG dalam mendukung sosialisasi HAM. Selain media massa dan pemanfaatan privileg HRWG menyusun agenda dan di patuhi merupakan arahan untuk menjalankan visi dan misi.

#### **A. Strategi HRWG dalam Mengagendakan Isu HAM ASEAN didalam KTT ASEAN 2011**

Semanjak AICHR disahkan ditahun 2009 di Thailand ASEAN mempunyai tugas penting dibidang HAM untuk memajukan, melindungi dan menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Tahun 2011 Indonesia mempunyai jabatan penting di ASEAN sebagai ketua Konfrensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT). Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dimanfaatkan oleh HRWG untuk fokus pada beberapa hal diantaranya adalah fokus pada pembahasan politik ASEAN terutama isu Hak Asasi Manusia agar masukan dari masyarakat sipil dapat didengar, menjalankan mandat AICHR dan ACWC, keterlibatan masyarakat sipil di ASEAN dibeberapa negara anggota ASEAN seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Burma dan Brunei Darussalam diharapkan dapat berjalan seimbang,

...mendorong... mekanisme HAM ASEAN serta melibatkan

masyarakat sipil dalam advokasi. HRWG percaya dengan fokus pada hal tersebut akan ikut mempromosikan kebebasan dasar hak asasi manusia secara efektif dan responsive berdasarkan *ASEAN Human Right Systems*.<sup>61</sup>

Di tahun 2011-2012 Indonesia bersingungan dengan sejumlah isu penting yang terkait hak asasi manusia pada tataran internasional baik pada mekanisme PBB, ASEAN dan OKI. Keterlibatan Indonesia di tingkat regional dan Internasional menjadi penting karena hal ini dapat mengangkat citra Indonesia di hadapan komunitas Internasional, selain itu hak asasi manusia menjadi salah satu tolak ukur penting dalam politik dan diplomasi luar negeri atas dasar tersebut pemerintah Indonesia harus memastikan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia harus di implementasikan pada tataran nasional. Dalam memaksimalkan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia di perlukan peranan penting masyarakat sipil yang mampu menjadi salah satu pendorong bagi negaran untuk mengaplikasikan hak asasi manusia baik di dalam perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM.<sup>62</sup>

Dengan kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 HRWG mengambil langkah untuk melakukan pendekatan dan lobbying terhadap beberapa instansi terkait seperti AMM atau yang di kenal dengan *ASEAN Ministerial Meeting*, ACMW, Forum Buruh Migran ASEAN, Sekretaris Jendral ASEAN, Komite Tetap RI, ASEAN Summit dan AICHR. HRWG melakukan pendekatan melalui lokakarya masyarakat sipil sebelum pertemuan resmi yang sudah diagendakan.

---

<sup>61</sup> *Annual Report HRWG 2010*

<sup>62</sup> *Bulletin Erga Omnes HRWG edisi 1*

Lokakarya yang dihadiri oleh masyarakat sipil tersebut adalah bentuk respon terhadap sejumlah isu-isu terkini. Hasil akhir lokakarya yang berupa laporan diserahkan kepada pemerintah. Hasil lokakarya tersebut fokus kepada keprihatinan masyarakat sipil terhadap proses demokrasi yang terkait terhadap hak asasi manusia tidak sesuai dengan kenyataannya.

Sebagai cara untuk memastikan kinerja mekanisme HAM ASEAN berjalan produktif dan membantu kinerja perwakilan Indonesia di AICHR dan ACMW di butuhkan tenaga bantu dari masyarakat sipil agar terjalin hubungan antara masyarakat sipil dengan pemerintah serta perwakilannya. Hal ini di maksudkan agar terjalin simbiosis antara kinerja pemerintah dan masyarakat sipil. Pendekatan ini di sebut juga dengan *bottom-up* dimana ada dorongan dari bawah yaitu masyarakat sipil untuk mempengaruhi pemerintah yang memegang kebijakan. Strategi ini dinilai ampuh dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah karena masukan masyarakat sipil mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan putusan disutau negara. Kinerja masyarakat sipil dinilai lebih efektif dan efesien dikarenakan masyarakat sipil lebih responsive terhadap isu-isu yang berada disekitar lingkungannya. Hal ini terbukti dengan keterbukaan masyarakat sipil di Kamboja, Loas, Vietnam, Burma dan Brune Darussalam untuk lebih berpartisipasi dengan isu-isu yang terkait HAM di kawasan Asia Tenggara serta mempengaruhi pemerintah setempat untuk melibatkan masyarakat sipil terkait isu-isu HAM di wilayah tersebut setelah mengikuti workshop yang di lakukan oleh HRWG.

Lobbying berasal dari kata Lobi yang berarti komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara informal dengan tujuan untuk mempengaruhi

proses pengambilan keputusan dan keuntungan tertentu. Lobby merupakan aktifitas interpersonal dan komunikasi yang dilakukan berdasarkan kedekatan pribadi, tujuan dasar dari lobby ini adalah mempengaruhi kebijakan oleh karena itu kegiatan lobby ini dianggap negatif dalam politik di beberapa negara. Akan tetapi ada pendapat lain tentang lobby ini yang menganggap lobby adalah salah satu seni dari komunikasi dan dianggap sebagai salah satu kebebasan dalam berbicara.<sup>63</sup>

HRWG sebagai civil society mempunyai hak dalam menyuarakan aspirasinya, civil society memiliki *influence* atau pengaruh besar dalam mempengaruhi setiap keputusan yang akan dihasilkan karena hal ini berpengaruh pada hajat hidup masyarakat ASEAN secara keseluruhan. HRWG memiliki hak istimewa dalam hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintahan. Hak istimewa atau yang dikenal dengan Privilege adalah akses yang dimiliki seseorang secara langsung untuk mengakses sesuatu yang berkaitan dengan kinerjanya. Privilege merupakan mekanisme yang digunakan oleh HRWG untuk mempengaruhi pemerintah tanpa melibatkan pihak lain, saluran langsung ini dapat berupa petisi pribadi. Hubungan pribadi adalah salah satu sarana penyampaian penekanan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik. Tindakan ini mereka lakukan untuk menyatakan tuntutan atau penekanan, hubungan individu dengan melalui hubungan keluarga ataupun dengan perantara kepada elit politik juga dilakukan demi mencapai tujuan mereka.

---

<sup>63</sup> <http://www.ijournal.com/244571/0aran-Lobbyist-dalam-Kemenangan-Pemilu-Obama> di akses 7

Hak istimewa yang dimiliki HRWG ini dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keputusan yang terkait dengan permasalahan HAM ASEAN secara menyeluruh. Strategi yang digunakan HRWG dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah HAM yang berpengaruh pada HAM salah satunya dengan menempatkan perwakilan langsung di tingkat ASEAN. Perwakilan langsung ini merupakan sarana yang memungkinkan suatu kelompok penekan untuk mengkomunikasikan secara langsung penekan-penekanannya melalui seorang anggota aktif dalam struktur pembuatan keputusan. Dalam hal ini HRWG menempatkan salah satu anggotanya untuk duduk di AICHR yaitu Rafendi Djamin sebagai perwakilan dari Indonesia untuk menjadi anggota AICHR. Selain Rafendi Djamin duduk dikursi ditingkat regional, anggota-anggota HRWG juga dikenal dekat dengan beberapa pembuat keputusan seperti Menteri Luar Negeri Indonesia dan Wakil Presiden RI. Dengan startegi pendekatan terhadap beberapa pejabat penting sangat memungkinkan sekali HRWG mempunyai previllage atau hak istimewa untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pembuat kebijakan. HRWG memiliki hak dan legitimasi untuk melakukan lobbying terhadap pemerintahan Indonesia dalam permasalahan HAM, hal ini dimaksudkan agar HRWG dapat memiliki pengaruh dalam melakukan kebijakkan pemerintah sehingga apa yang di sampaikan dapat terakomodasi.

Pendekatan yang dilakukan oleh HRWG melalui kedekatan individu dan sebagai warga negara dimanfaatkan sebagai salah satu cara efektif untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Previlage yang dimiliki HRWG merupakan

mereka. Previlage yang dimiliki individu-individu HRWG ini dimanfaatkan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, selain hal itu pendekatan masyarakat sipil lewat workshop, seminar dilakukan oleh HRWG untuk mencapai tujuannya.

Seperti pada seminar yang dilakukan oleh HRWG dengan tema *Changing Context on Human Right Mechanisms and its Challenges dan Constitution and ASEAN Human Right Declaration*, pada pembahasan *Changing Context* sebagai nara sumber dihadirkan dari perwakilan Indonesia untuk mekanisme HAM Regional, diantaranya adalah Refendi Djamin perwakilan dari Indonesia dan Ketua AICHR, Ahmad Taufan Damanik dan Rita Serena Kolibonso perwakilan Indonesia untuk ACWC dan Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai perwakilan dari Komisioner IPHRC OKI Pada diskusi *Constitution and ASEAN Human Right Declaration* menghadirkan narasumber yang ahli dibidang HAM dan konstitusionalisme yaitu Herlambang Perdana dan Muchamad Ali Syafa'at. Kedua tema yang menjadi bahan diskusi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan mekanisme HAM ASEAN dan OKI sekaligus untuk mendeklarasikan HAM ASEAN yang masih dalam proses pembentukan.<sup>64</sup>

Previlage yang dimiliki HRWG digunakan oleh Rafendi Djamin untuk bertemu persiden Barack Obama pada Global Human Rights Advocated Confrence yaitu konfrensi tentang peranan Amerika Serikat dalam meningkatkan Hak Asasi Manusina di seluruh dunia. Kofrensi tersebut di adakan pada tanggal 18 Februari 2010 bertempat di Gedung Putih Washington DC. Dalam kesempatan

tersebut Rafeendi Djamin menceritakan perkembangan terakhir kasus munir yang belum menemui titik terang dan mendesak Obama untuk bertemu masyarakat sipil Indonesia selama kunjungannya di Indonesia pada bulan Maret 2010, di pertemuan tersebut pula Barack Obama menggapai bahwa AS akan mempromosikan demokrasi dengan lebih memperhatikan aktivis Hak Asasi Manusia.<sup>65</sup>

Untuk menanggapi kesiapan pemerintah Indonesia sebagai Ketua KTT 2011 bersama dengan NGO-NGO dalam tingkatan regional dan Internasional HRWG membuat draf yang akan di ajukan sebagai masukan dalam KTT 2011. Kegiatan ini di realisasikan dalam kegiatan *Asean People Forum* atau di kenal dengan APF. Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kinerja sebuah intitusi, lembaga-lembaga tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan yang jelas mempermudah jalan untuk mewujudkan misi mereka karena di dukung keadaan yang relevan, sedang terjadi atau mempersiapkan apa yang akan terjadi dalam mewujudkan misi-misi mereka sebagai benteng dan sekaligus perlindungan dalam setiap misi mereka.

Dalam kegiatan tersebut APF menekan kembali prinsip dasar-dasar demokrasi dan supremasi hukum, Hak Asasi Manusia dan martabat, dan pembangunan ekonomi, sosial, gender dan keadilan ekologis sehingga dapat membawa perdamaian dan kemakmuran di wilayah ASEAN. APF memberikan masukan bagi ASEAN agar lebih memperhatikan semua pilar ASEAN. Di

---

<sup>65</sup> <http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/20/obama-informed-munir-case-hrwg.html> di

harapkan perlakuan adil dan bijaksana untuk masyarakat dan menyesuaikan kebijakan dan praktek-praktek dari semua pilar ASEAN. Selain itu prinsip kebebasan di jadikan prioritas dan di informasikan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat adat, perjanjian ekonomi dan sosial di tangani oleh ASEAN. Selain itu ASEAN harus memastikan bahwa pembangunan di kawasan Asia tenggara tidak merusak lingkungan, kerusakan lahan masyarakat tradisional, hutan yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Kegiatan ini merupakan bagian dari advokasi HRWG untuk mencapai tujuannya di dalam sosialisasi HAM ASEAN, dengan melakukan *counter draf* atau pengajuan konsep yang ingin di capai HRWG dan NGO-NGO yang lain berusaha mempengaruhi keputusan dan kebijakan ASEAN dalam legalisasi HAM ASEAN.

Pada tanggal 7 Mei 2011 disela-sela KTT berlangsung presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan sejumlah Parlemen ASEAN (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Representative*), wakil-wakil pemuda (*Youth Representatives*) dan *Civil Society Organizations (CSOs) Representatives*.<sup>66</sup> Pada kesempatan tersebut HRWG yang tergabung pada APF menyampaikan pengajuan Isu HAM agar dapat dijadikan salah satu pembicaraan pada KTT berlangsung.<sup>67</sup>

Pendekatan melalui privilege yang HRWG miliki adalah kekuatan tersendiri bagi HRWG untuk mewujudkan visi dan misinya dalam pergerakan Hak Asasi Manusia. Strategi ini memiliki kekuatan tersendiri bagi masyarakat

sipil untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan yang dinilai tidak relevan dengan keadaan aslinya. HRWG sebagai salah satu NGO besar di Indonesia menyadari bahwa kekuatan dari masyarakat sipil mampu memberikan pengaruh besar bagi kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan HAM agar tercapainya keadilan dan ketertipan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya dan kawasan Asia tenggara pada umumnya.

## **B. Media Massa**

Perkembangan politik tidak dapat lepas dari meningkatnya kesadaran civil society untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih berkualitas. Civil society berupaya untuk mempengaruhi sistem politik agar rumusan kebijakan menjadi berpihak pada kepentingan masyarakat. Di sisi lain media massa menjadi alat kontrol bagi penyelenggara kekuasaan melalui publikasi dan pembentukan opini publik.

Media massa adalah alat yang di gunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari nara sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, film, radio, TV. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audisi yang luas dan heterogen. Media massa mempunyai kelebihan yaitu media massa mengatasi hambatan ruang dan waktu bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas.

Media massa memberikan informasi tentang perubahan bagaimana hal itu bekerja dan hasil yang dicapai atau yang akan dicapai. Ciri khas dari media massa

1. Tidak di tunjukkan pada kontak persampangan mudah didapetkan isi

merupakan hal umum dan merupakan komunikasi satu arah. Keuntungan dari komunikasi menggunakan media massa adalah media massa menimbulkan keserempakan artinya suatu pesan dapat di terima oleh masyarakat luas.<sup>68</sup>

Media massa memiliki fungsi sebagai penyebar informasi dan pembentuk opini masyarakat, dalam struktur negara pada saat ini hampir seluruh pembuat keputusan mempunyai akses ke media massa sehingga peranan media massa menjadi penting, keterlibatan media massa dalam kerja advokasi memberikan pengaruh besar dalam tiap langkah advokasi.<sup>69</sup>

Media massa dan LSM bekerjasama dalam membentuk sebuah gagasan perubahan atau opini publik media massa berperan menyampaikan suara publik melalui pemberitaan dan informasi, disisi lain LSM membela kepentingan masyarakat terutama bagi mereka yang mengalami tindakan ketidakadilan, berbagai aktivitas pendampingan, pendidikan krisis dan advokasi LSM bekerja sesuai dengan tujuan mereka sedangkan wartawan mempunyai kepentingan dalam mencari berita sesuai dengan tugas yang di emban oleh mereka.

Kerjasama LSM dan media massa sangat memungkinkan, media massa berperan menyampaikan suara publik lewat pemberitaan dan informasi. Siaran press misalnya dimanfaatkan sebagai cara untuk menyebarkan apa yang sedang terjadi, LSM bisa memberikan informasi dengan apa yang sedang terjadi

---

<sup>68</sup> <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2060385-pengertian-media-massa/#ixzz2KfMOCyVa> di akses 12 Maret 2013

<sup>69</sup> <http://www.bukumanline.com/berita/baca/lt4cc4fd01ed5d2/media-massa-diperlukan-dalam->

sedangkan wartawan mampu mengemasnya menjadi sebuah berita yang menarik untuk disebar luaskan.

Media massa merupakan bagian dari civil society, melalui pemberitaan yang didapat mengenai ketidakadilan dalam negara ini memberikan pendidikan mengenai hak-hak dan kewajiban bagi seorang warga negara. Fungsi media massa sebagai penyebar informasi dan pembentuk opini masyarakat dalam struktur negara ini seluruh *stakeholder* atau pembuat keputusan advokasi memiliki akses ke media massa sehingga peranan media menjadi sangat penting.

Dalam membangun opini publik NGO tidak segan untuk melakukan hal tersebut dengan menyiarkannya lewat media massa dengan menyampaikan kelemahan pemerintah ditingkat nasional maupun regional. Umumnya NGO mengkritik tajam dan terkadang menyudutkan kebijakan yang dilakukan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat atau kebijakan yang terkadang tidak relevan dengan realitasnya.

Selain menggunakan pendekatan secara individu atau kelompok HRWG memanfaatkan media sebagai salah satu penunjang dalam mempengaruhi pemerintah. Media merupakan salah satu cara dari komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik yang menjadi input dalam sistem politik dan pada waktu yang sama hal ini dapat menjadi output dari sistem politik. Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan press atau media massa sebagai salah satu bentuk dari pilar penting untuk tegaknya sebuah demokrasi. Aktivitas press di Indonesia dalam melaporkan peristiwa mampu memberikan

damak signifikan seperti pada pemerintahan orde baru dimana press pada saat

itu cepat dalam memberikan pemberitaan tumbangnya rezim orba oleh gerakan reformasi di tahun 1998.

Press di Indonesia sekarang ini mengalami perubahan fungsi hakikinya, media massa di tanah air lebih sering di manfaatkan sebagai alat politik untuk kepentingan dan menyukseskan tujuan pribadi atau kelompok tertentu. Kedaan masyarakat kita yang haus akan informasi membuka peluang bagi kelompok tertentu untuk berperan lebih jauh dalam melancarkan misinya agar memudahkan apa yang ingin dicapai. Media massa memiliki kekuatan penuh untuk menubuhkan kehidupan berdemokrasi,<sup>70</sup> HRWG menfaatkan keadaan ini untuk menyapaikan aspirasinya lewat media massa dimana diharapkan mampu mempengaruhi pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan terutama dalam keputusan HAM. Sarana yang digunakan HRWG dalam aktivitas politik berupa media Internal dan external, media internal bulletin, penelitian, dan hasil dari laporan konfrensi, workshop, seminar yang di lakukan atau diikuti oleh HRWG. Web adalah satu media yang digunakan HRWG dalam memposting semua informasi yang berkaitan dengan HAM, memumudahkan bagi masyarakat umum untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

Melalui bulletin yang diterbitkan HRWG mengulas kegiatan dan keterlibatan masyarakat sipil Indonesia dalam mekanisme HAM internasional, regional dan cross-regional dengan fokus pada advokasi disetiap levelnya. Pada bulletin pertama HRWG ini mengulas advokasi HAM di tingkat PBB dimana

---

<sup>70</sup> <http://politik.kompas.com/2012/01/21/media-massa-sebagai-alat-politik-529644.html> di

masyarakat sipil ikut mendorong ratifikasi beberapa Konvensi Internasional yang dijanjikan pemerintah Indonesia akan tetapi belum terlaksana. Pada tingkatan ASEAN HRWG tengah mengadvokasi pemebentukan Deklarasi HAM ASEAN dan penguatan AICHR, memperkuat mekanisme ACWC,advokasi buruh migran ASEAN serta melakukan pertemuan tingkat nasional dan regional dalam upaya menyampaikan masukan dan gagasan dari masyarakat sipil terhadap mekanisme HAM ASEAN secara keseluruhan. Disamping HRWG fokus pada pembahasan HAM PBB dan ASEAN, mekanisme penting yang sedang menjadi perhatian masyarakat sipil adalah mekanisme HAM OKI dimana IPHRC OKI baru didirikan dan yang menjadi satu aspek penting adalah advokasi HAM OKI yang terkait dengan hak-hak perempuan.<sup>71</sup>

Media eksternal yang dimanfaatkan oleh HRWG oleh berkerjasama dengan press dan jurnalis di Indonesia dan mengeluarkan press release yang dimuat di beberapa surat kabar dan blog. Seperti *press release* HRWG yang menanggapi serangan yang terjadi pada beberapa rumah ibadah di Indonesia, HRWG mengancam dan sekaligus mendesak pemerintahan dan aparat untuk bertindak tegas kepada siapa saja yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan, menghormati kebebasan beragama dan kepolisian dituntut bertindak tegas kepada individu ataupun kelompok yang melauka perusakan terhadap rumah ibadah agama lain.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Bulletin erga omnes HRWG edisi 1

<sup>72</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/20/press-releasehuman-rights-working-group-indonesia-777-coalition-for-international-human-rights-advocacy-463690.html> di akses 7 Juli

Pada media eksternal yang dimanfaatkan HRWG adalah berupa kerjasama dengan press dan jurnalis di Indonesia dan luar negeri. Jakarta post adalah salah satu media cetak yang memuat tulisan dari Yuyun Wahyuningrum senior advisor di HRWG menguuls tentang mekanisme HAM merupakan solusi atau masalah.<sup>73</sup> Selain tanggapan mengenai mekanisme melalui Kompas mengkritik masalah buruh migrant di Indonesia, selain itu HRWG juga mendorong Ratifikasi Kovensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarga.<sup>74</sup>

Advokasi yang berbalut media massa ini di anggap sukses untuk mempengaruhi khalayak umum dan dapat dijadikan sebagai alat propaganda oleh pihak tertentu, seperti partai politik misalnya, akan tetapi propaganda dan advokasi sangat berbeda, advokasi tindakan yang lebih halus, tidak ingin menjatuhkan atau memenangkan salah satu pihak hanya saja advokasi secara umum untuk penyadaran terhadap hal-hal yang selama ini tertutupi oleh pandangan umum, dimana pandangan umum tersebut sudah menjadi kuat dan menjadi wajar. Dalam advokasi proses penyadaran di lakukan tidak hanya sendiri akan tetapi dibutuhkan massa agar tujuan yang dicanangkan tercapai, dalam hal ini kekuatan media massa di nilai dapat memberikan kekuatan untuk mengekspos dan menyiarkan apa yang sedang terjadi.

Selain media massa HRWG juga menjalankan aksi-aksinya dalam sosialisasi HAM ASEAN pengungkapan aksi-aksi publik dengan cara melakukan pertemuan massal dan parade juga dilakukan oleh HRWG, seperti dalam aksi "Mimbar

---

<sup>73</sup> <http://jendelaperistiwa.blogspot.com/2012/10/rights-mechanisms-solutions-or-problems.html?m=0> di akses 8 Juli 2013

<sup>74</sup>

Seribu Harapan” dalam aksi tersebut HRWG bersama dua puluh Sembilan NGO mengkampanyekan Indonesia bebas dari korupsi, kekerasan dan perusakan lingkungan. HRWG menggunakan strategi ini untuk mengkomunikasikan tuntutanannya, strategi ini disebut “*bear witness*” ( *a quaker tradition of silent protest* ), yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh NGO untuk menjadikan dirinya sebagai saksi atas terjadinya perbuatan-perbuatan atau tindakan yang melanggar HAM.

Secara tidak langsung NGO yang menyuarakan tuntutannya berupaya mempengaruhi pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara mengandalkan kekuatan dan dukungan untuk mengontrol dan melindungi masyarakat ASEAN secara global dari perlakuan pelanggaran HAM. *Direct action* adalah aksi protes dimana aktivis atau pemerotes melawan melalui aksi yang dirancang bukan hanya untuk mengubah kebijakan pemerintah atau mengubah opini publik melalui media, akan tetapi juga dapat mengubah kondisi di sekelilingnya secara langsung, *Direct action* ini juga merupakan bagian dari power.

Aksi HRWG yang lain adalah menuntut pemenuhan hak-hak konstitusional dalam penghayatan terhadap Tuhan YME, bersama MADIA ( Masyarakat Dialog Antar Agama ), Badan Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME (BKOK), Himpunan Kepercayaan terhadap Tuhan YME ( HPK ), HRWG menggambarkan suatu praktek diskriminatif yang masih berlangsung di negara Indonesia terutama dalam memiliki agama dan keyakinan. Pengajuan ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meninjau

kembali kebijakan-kebijakan tanpa memandang individu dan latar belakang yang dapat menimbulkan diskriminatif. Pengajuan ini di harapkan dapat mendorong kerja-kerja advokasi HRWG dalam mewujudkan terpenuhi dan terlindunginya hak asasi manusia di negara ini.

Pendekatan melalui seminar dan workshop juga di lakukan oleh HRWG, workshop *Strengthening ASEAN Human Right system through Civil Society Advocacy* di bulan Oktober 2012, bertempat Phnom Pennh Kamboja HRWG turut serta menjadi pembicara dalam workshop tersebut. Perwakilan dari HRWG adalah Rafendi Djamin perwakilan Indonesia untuk AICHR dan Yuyun Wahyuningrum senior advisor HRWG menyampaikan pentingnya reaksi dari Masyarakat Sipil apabila penyusunan AHRD apabila tidak sesuai dengan Hak Dasar Manusia, untuk itu diperlukan strategi advokasi yang matang dalam menagapi persoalan tersebut. Kegiatan ini sangat di manfaatkan HRWG untuk membuktikan HRWG mempunyai peranan penting dalam penegakan HAM di ASEAN. Workshop yang di hadiri dari berbagai LSM di ASEAN dan HRWG sebagai salah satu pembicara membuktikan eksistensi HRWG dan kematangan HRWG dalam advokasi HAM mampu memberikan pengaruh kepada NGO lainnya, lewat workshop yang di berikan serta diskusi-diskusi yang teselenggara.

Kritik atas deklarasi HAM Asia Tenggara yang di gagas oleh AICHR di sampaikan oleh pihak HRWG Yuyun Wahyuningrum sebagai wakil LSM dari HRWG kepada AICHR di Manila pada bulan September 2012. Aktivistis HRWG berpendapat di dalam draf deklarasi HAM ASEAN terdapat pembatasan HAM seperti baik dalam berkegiatan dan berkumpul selain itu pada prinsip dasar draf

deklarasi HAM ASEAN tidak mencangkup prinsip hak-hak dasar seperti hak non-diskriminasi dan kesamaan martabat atau dignity, karena hal itu merupakan jaminan hak kita untuk dipenuhi. Disisi lain sebagian anggota AICHR berpendapat deklarasi HAM ASEAN harus sesuai dengan kondisi Negara masing-masing, tentu saja pandangan ini di tolak oleh aktivis HRWG. Dengan adanya tanggapan seperti ini aktivis HRWG berpendapat adanya kepentingan nasional di balik deklarasi HAM, seperti pemerintah menjadikan deklarasi ini untuk melindungi pemerintah dari kritikan internasional dan masyarakat sipil.

Menyikapi perkembangan ini, HRWG mendesak pemerintahan Indonesia lewat Kementrian Luar Negeri harus menunjukkan kepemimpinannya dibidang demokrasi dan HAM dengan cara memasukkan nilai-nilai ideal HAM dalam deklarasi HAM ASEAN, selain itu koalisi LSM berupaya menemui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa agar usulan yang di adukan koalisi dapat di masukkan dalam draf deklarasi HAM ASEAN.<sup>75</sup>

Melalui media massa Aksi yang di lakukan HRWG sebagai wujud perjuangan HAM adalah mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada saat kunjungannya di Indonesia pada bulan September 2012 adalah mendorong dan mendesak Menlu AS tersebut berbicara tentang persoalan toleransi terhadap agama, kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, selain itu HRWG mendesak Hillary untuk berbicara kasus Munir yang belum terselesaikan, mengingat Menlu AS tersebut pernah bertemu dengan istri alm.Munir dan berjanji mendorong kasus Munir agar terungkap.

Keprihatinan tentang pemahaman HAM belum sepenuhnya merata, bahkan bagi mereka yang bergerak di bidang HAM pun belum mengetahui peran lembaga-lembaga internasional dan regional dalam memajukan hak-hak asasi manusia, PBB misalnya yang di bentuk dengan pertimbangan kemanusiaan dan berfungsi sebagai penetap standard dan pemantau bagaimana Negara-negara anggotanya memenuhi standar hak-hak manusia. Indonesia sebagai Negara anggota PBB mempunyai kewajiban moral dan hukum yang sama untuk menjamin hak-hak manusia atas warganegaranya, maka advokasi hak-hak manusia melalui sistem hak-hak manusia PBB menjadi sesuatu yang dapat melengkapi upaya advokasi di tingkat nasional. Advokasi adalah hal yang menjadi sangat penting setelah AICHR, fungsi utama dari AICHR adalah memajukan hak-hak manusia ditataran regional, oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan mutlak yang memadai tentang cakupan sistem hak-hak manusia di tataran regional dan internasional. HRWG yang di bentuk untuk pemajuan HAM di Indonesia tidak terpisahkan dari gerakan hak-hak manusia dunia, dengan mandate untuk melakukan advokasi di ranah internasional dan meningkatkan keberhasilannya dalam HAM, HRWG membuka sekolah HAM sebagai cara yang di lakukan untuk meningkatkan kapasitas pekerja HAM untuk melakukan advokasi di ranah tingkat Internasional.

HRWG melakukan berbagai tindakan untuk menekan pemerintahan Indonesia dalam memajukan perlindungan HAM di Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan penekanan terhadap pemerintahan Indonesia.

Salah satu di Indonesia di nilai sangat kurang HRWG menilai

pemerintahan Indonesia cenderung diam dan tidak mengambil keputusan tegas terhadap konflik pelanggaran kebebasan beragama hal ini berbanding terbalik dengan undang-undang yang melindungi kebebasan agama. Seperti pada kasus G

KI Yasmin di Bogor Jawa Barat, dimana pencegahan pembangunan gereja oleh Walikota Bogor meskipun pada akhirnya mahkamah Agung pada tahun 2011 menetapkan GKI Yasmin boleh mendirikan gereja akan tetapi putusan tersebut tetap di tentang oleh wakil bupati Bogor.<sup>76</sup>

Selain aksi desakan kepada pemerintahan Indonesia HRWG juga mendesak pemerintahan Myanmar dalam kasus kekerasan yang menimpa warga Rohingya pada tahun 2012 lalu. HRWG mendesak pemerintahan Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap pencari suaka di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, selain itu HRWG juga mendesak Komnas HAM Myanmar untuk memberikan jaminan keadilan dan memastikan para pelaku penyerangan di hukum. HRWG berpandangan bahwa pemerintahan Myanmar membiarkan pelanggaran HAM terhadap etnis rohingya dan berujung pada meningkatnya kekerasan dan konflik di Myanmar selain itu pasukan keamanan Myanmar terlibat langsung dalam memperkeruh konflik. Dukungan terhadap perdamaian di ASEAN membuat HRWG mendukung sekretaris Jendral ASEAN

---

<sup>76</sup> <http://www.detik.com/2012/10/05/hrwg-pemerintah-ikut-memelihara-intoleransi-agama>

Surin Pitsuwan untuk dilibatkan dalam proses perdamaian dan membantu korban kekerasan di Myanmar.<sup>77</sup>

### **C. Posisi HRWG Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil di ASEAN**

Konfrensi Tingkat Tinggi ASEAN adalah salah satu pertemuan puncak para pemimpin negara-negara ASEAN dalam pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara. KTT dibentuk untuk menindaklanjuti kerjasama antar Negara anggota ASEAN. Masa awal terbentuknya ASEAN tidak luput dari peranan Indonesia sebagai salah satu pendiri organisasi penting di kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia dikarenakan ASEAN mempunyai pengaruh terhadap situasi domestik di Indonesia, oleh karena hal tersebut terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan kondusif disertai terjalinnya hubungan harmonis dengan negara-negara di Asia Tenggara dirasakan sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia.

Indonesia menempatkan ASEAN sebagai lingkungan utama dari politik luar negeri memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN. Di tahun 2011 Indonesia akan mengemban tugas penting di lingkungan ASEAN, yaitu Indonesia akan memegang kepemimpinan bergilir di ASEAN. Kesempatan ini merupakan moment bagi Indonesia di karenakan Asia menjadi perhatian dunia untk beberapa tahun belakangan ini, dengan perubahan geopolitik yang lebih

---

<sup>77</sup> <http://www.haritasatu.com/asia/62665-brug-desak-kompas-ham-myanmar-usut-tragedi->

cenderung ke Negara-negara Asia dan termasuk juga Asia Tenggara menjadi kesempatan besar bagi ASEAN untuk lebih terlibat dalam politik global.<sup>78</sup>

Sejarah juga membuktikan pentingnya peranan Indonesia kemajuan ASEAN adalah ketika Indonesia menjadi tempat pertama dalam menyelenggarakan KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976. Kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan di kawasan Asia Tenggara dinilai positif oleh wakil perdana menteri pertahanan AS.<sup>79</sup> Indonesia menjadi salah satu promotor utama dalam menyelesaikan masalah di kawasan regional dengan cara diplomasi hal ini diperkuat dengan negara-negara anggota ASEAN terhadap peran Indonesia dalam penyelesaian masalah-masalah baru di kawasan Asia Tenggara. Indonesia banyak memprakarsai pertemuan-pertemuan internasional dan mengambil kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestik Indonesia dalam memajukan kepentingan nasional dan global baru Indonesia.

Keberhasilan menempatkan kembali posisi instrumental Indonesia terhadap ASEAN juga menjadi modal penting bagi pengaruh politik luar negeri Indonesia terhadap negara-negara di luar kawasan ASEAN. Indonesia mempunyai kepentingan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai, diplomasi Indonesia di arahkan untuk mencapai tujuan tersebut selain itu hal ini menjadi landasan kokoh bagi suatu kerjasama bagi keamanan regional.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> <http://news.okezone.com/read/2011/01/03/349/409806/peran-penting-indonesia-di-asean>  
di akses 5 Mei 2013

<sup>79</sup>

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18900/1/NABIL%20AHMAD%20FAUZ>  
I-FUF.pdf di akses 5 Mei 2013

<sup>80</sup> <http://id.scribd.com/doc/156077349/147772697-Diplomasi-2011> di akses 5 Mei 2013

Di tahun 2011 Indonesia menjadi Ketua ASEAN, hal ini berdampak positif pada organisasi di kawasan Asia Tenggara terutama komunitas ASEAN 2015, melalui presiden SBY Indonesia berkomitmen aktif mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan anggota ASEAN demi tercapainya manfaat bagi seluruh masyarakat.<sup>81</sup> Dengan adanya dukungan masyarakat demi tercapainya manfaat dari kegiatan-kegiatan ASEAN HRWG sebagai masyarakat sipil memanfaatkan kegiatan ini untuk memperkokoh HAM di kawasan Asia Tenggara.

Selama kepemimpinan Indonesia di ASEAN ditahun 2011 keterlibatan masyarakat sipil, hak asasi manusia dan demokrasi sudah terlihat di dalam agenda ASEAN, Indonesia berupaya memperlihatkan kepada dunia bahwa Negara-negara di ASEAN memperhatikan Hak Asasi Manusia, demokrasi dan perdamaian hal ini juga merupakan salah satu kunci untuk bergabung dan menjadi bagian dari komunitas global. Bali Concord III merupakan salah satu pembuktian bahwa komunitas ASEAN bersama sepuluh Negara berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara untuk mencegah kekerasan terhadap HAM, membangun mekanisme untuk kerjasama dan mengembangkan kawasan ASEAN yang menekankan prinsip keseimbangan dinamis.

HRWG sebagai lembaga masyarakat yang konsen pada pembelaan HAM ikut berperan aktif dalam pelaksanaan KTT 2011, dalam rangka persiapan KTT 2011 HRWG menyusun beberapa kegiatan fokus pada sosialisai HAM ASEAN untuk dilegalkan pada pembahasan KTT 2011. Tujuan dari kegiatan ini untuk

memastikan bahwa mekanisme ASEAN dan standar untuk melindungi hak asasi manusia serta mempromosikan prinsip-prinsip internasional HAM beserta nilai-nilainya, mengembangkan hubungan kerjasama dan dialog ASEAN dalam mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan mendokumentasikan dan memberikan pelajaran bagi masyarakat sipil dalam melibatkan sistem HAM dalam ASEAN.

HRWG bersama Elsam, IESR, Imparsial, Infid, KontraS, Solidaritas perempuan, Yayasan Sejiwa, YLBHI memberikan masukan terbuka untuk Rapat Komisi HAM ASEAN (AICHR) yang ke-6 pada 28 Juni sampai 2 Juli 2011 di Vientiane Laos. Masyarakat sipil tersebut memberikan surat untuk pemerintah Indonesia bermaksud untuk menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia untuk mendorong kemajuan mekanisme HAM ASEAN, selain itu perhatian masyarakat sipil atas perkembangan HAM dan ASEAN masyarakat sipil menyampaikan masukan kepada komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR). Masukan yang diberikan masyarakat sipil kepada AICHR di fokuskan pada pedoman Operasional AICHR, Draf Deklarasi HAM ASEAN, Studi tematik AICHR serta Komisi dan Laporan kerja Perwakilan Indonesia di AICHR.<sup>82</sup>

Pada pertemuan Komisi HAM OKI (IPHRC) yang di selenggarakan selama lima hari pada tanggal 20 Februari 2012 – 24 Februari 2012 di hotel Aryaduta Jakarta. Pada pertemuan tersebut di hadiri oleh 17 komisioner IPHRC,

<sup>82</sup> <http://www.hrwg.org/en/asean/civil-society-activities/document/item/73-masukan-terbuka-kepada-komisi-ham-asean-aichr-ke-6-28-juni-2-juli-2011>

pelibatan ahli HAM , Masyarakat Sipil dan para peninjau dari negara anggota. Sebelum di selenggarakan IPHRC di hotel Aryaduta pada tanggal 19 Februari 2012 HRWG bersama Indonesia Civil Society dan perguruan tinggi, HRWG menyelenggarakan pertemuan untuk mengapresiasi Kementerian Luar Negeri khususnya Direktorat HAM dan Kemanusiaan yang telah memberikan akses kepada masyarakat sipil untuk melibatkan masyarakat sipil. Pada pertemuan itu pula di maksudkan untuk mengumpulkan masukkan-masukkan masyarakat sipil Indonesia untuk IPHRC terkait isu-isu tertentu dan mekanisme HAM yang kredibel, akuntabel dan independen sebagaimana mekanisme HAM regional atau Internasional. Hasil pertemuan HRWG yang diselenggarakan 19 Februari 2012 tersebut menghasilkan rekomendasi yang disusun dan diserahkan kepada Komisioner pada tanggal 23 Februari 2012, bahkan rekomendasi tersebut menjadi acuan utama bagi Komisioner untuk fokus kepada tema-tema tertentu dalam pembahasan isu yang akan menjadi mandate IPHRC nantinya.<sup>83</sup>

Pada pertemuan IPHRC tersebut HRWG hadir sebagai CSO perwakilan dari Indonesia dan beberapa CSO lainnya, selain itu HRWG hadir sebagai pemantau jalannya pertemuan tersebut. Disela-sela pertemuan tersebut HRWG bersama masyarakat sipil lainnya mengadakan Informal Luncheon Talks yang di selenggarakan pada tanggal 21 Februari 2012. Pertemuan tersebut yang di kemas dengan agenda makan siang sekaligus mengundang para Komisioner, Duta Besar Negara asal Komisioner, perwakilan CSO di Indonesia dan Diplomat Community. Pada pertemuan ini CSO dari Indonesia menyampaikan Briefing Paper

terkait pembangunan mekanisme HAM regional yang efektif dan akuntabel dengan proses perumusan RoP IPHRC, serta harapan terkait dengan sikap IPHRC terhadap isu-isu tertentu.<sup>84</sup>

Power atau kekuasaan yang dimiliki NGO lewat privilege yang mereka miliki di manfaatkan untuk mempengaruhi orang lain, merubah orang lain melalui kemampuan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain. Keterlibatan masyarakat sipil di ASEAN di harapkan dapat merubah praktek akuntabilitas di ASEAN tentunya hal ini secara tidak langsung lebih mengiatkan peran masyarakat sipil menjadi lebih terlihat sehingga dapat membentuk kapasitas dialog sosial antara masyarakat sipil dan ASEAN serta mendukung perubahan ASEAN yang lebih terbuka.

Privilege yang di miliki oleh pihak HRWG di dapat melalui trans building yang di maksudkan adalah ada saluran atau penyalur untuk mendapatkan privilege tersebut. Selain itu melalui pendekatan sebagai warga Negara yang Hak nya di lindungi oleh Konstitusi HRWG memanfaatkan hal tersebut untuk mempertanyakan pemajuan HAM dan informasi tentang keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Salah satu hasil dari usaha-usaha HRWG dilingkup ASEAN ialah melalui wakilnya Rafendi Djamin yang berhasil untuk kedua kalinya menjadi perwakilan dari Indonesia untuk duduk di AICHR. Di dalam rancangan kerja HRWG dan sesuai ToR AICHR 4.2 untuk membentuk ASEAN Human Right Declaration yang

kemudian pada akhirnya AHRD tersebut menjadi pedoman standar HAM di lingkup ASEAN. AHRD atau yang di kenal dengan Asean Human Right Declaration adalah badan HAM ASEAN yang di bentuk sebagai kerangka kerjasama dalam hak asasi manusia di ASEAN dan di yakini dapat berkontribusi dalam pembentukan komunitas ASEAN kedepannya.<sup>85</sup>

Proses terbentuknya AHRD juga di tidak terlepas dari dukungan LSM, HRWG bersama Elsam, IESR, Imparsial, Infid, KontraS, Solidaritas Perempuan, Yayasan Sejiwa dan YLBHI untuk memberikan masukan terbuka dalam proses AHRD, bahkan mereka memberikan hak sepenuhnya dalam penyusunan dalam penyusunan AHRD. Bentuk bentuk dari rekomendasi tersebut adalah melakukan konsultasi pada tingkat nasional dengan melibatkan semua elemen seperti LSM, pemerintah yang terkait, dan komisi negara yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. Melakukan konsultasi di tingkat regional untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan dari sepuluh anggota ASEAN. Memberikan kesempatan pada masyarakat sipil untuk memberikan masukan sebelum draf deklarasi di adopsi. Mengundang pakar HAM baik dalam ataupun luar ASEAN untuk memberikan saran. Meminta saran ataupun bantuan teknis kepada United Nations Office of The Commissioner for Human Right.<sup>86</sup>

Penerapan AHRD ini pada KTT ASEAN ke-21 akan lebih mempromosikan perdamaian, keamanan, rekonsiliasi dan perlindungan hak asasi

<sup>85</sup> <http://www.deplu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=277&l=id> di akses 5 Maret 2013

<sup>86</sup> <http://www.hrwg.org/en/asean/civil-society-activities/document/item/73-masukan-terbuka-masyarakat-sipil-indonesia-untuk-rapat-komisi-ham-asean-aichr-ke-6-28-juni-2-juli-2011->

manusia di wilayah ASEAN. Di dalam AHRD tidak hanya memperkenalkan standar normatif tentang Hak Asasi Manusia sebagai kerangka kerja umum untuk hubungan antara masyarakat ASEAN. Fungsi AHRD untuk menegaskan tujuan dan prinsip ASEAN sebagaimana tercatum dalam piagam ASEAN, menegaskan kembali tentang deklarasi universal Hak Asasi Manusia, menegaskan kembali pentingnya usaha ASEAN dalam mempromosikan hak sasi manusia dan meyakini deklarasi ini akan membantu kerangka kerja sama hak asai manusia di wilayah ASEAN<sup>87</sup>. AHRD dapat di jadikan dasar bagi berbagai dokumen atau perjanjian HAM ASEAN yang akan di siapkan pada masa mendatang<sup>88</sup>, pengaruh AHRD ini tentu akan ikut menentukan arah Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan prinsip-prinsip AHRD yang telah di jelaskan sebelumnya.

#### **D. Tantangan bagi HRWG dalam penegakan HAM**

Prestasi penegakan HAM Indonesia di mata internasional dinilai belum berhasil, beberapa contoh yang menunjukkan hal tersebut adalah Indonesia tidak menindak lanjuti beberapa komunikasi dengan dewan HAM PBB mengenai pelanggaran HAM yang berbasis agama. Indonesia berhasil mengajak pemerintahan Filipina dalam meratifikasi Konvensi mengenai buruh migrant, akan tetapi di sisi lain pemerintahan dalam negeri tidak menjalankan apa yang

---

<sup>87</sup> <http://www.asean.org/news/asean-statement-communicues/item/asean-human-rights-declaration> di akses 4 juni 2013

<sup>88</sup> <http://www.satkab.go.id/berita-6377-shv-dan-nara-pemimpin-asean-tandatangani-deklarasi->

telah di mandatkan.<sup>89</sup> Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sebagai komitmen dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Ketimpangan dan ketidakadilan masih banyak terjadi terutama di kawasan timur Indonesia, kesenjangan dan ketimpangan itulah yang memicu munculnya konflik sosial di masyarakat.

Ketertinggalan yang di alami masyarakat di kawasan Indonesia timur terjadi akibat lemahnya komitmen pemerintah pusat melakukan pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah di Indonesia, pemerintah juga tidak melindungi kebutuhan dasar hidup masyarakat di kawasan Indonesia bagian timur, padahal masyarakat di sana sangat bergantung dengan eksplorasi sumber daya alam. Kekayaan alam yang di miliki kawasan Indonesia bagian timur banyak di minati investor asing dengan membangun perusahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi sumber alam tersebut akan tetapi pengasilan yang di dapat lebih banyak masuk ke Jakarta ketimbang wilayah tambang. Ketidakadilan ini dapat di lihat di perbatasan Kalimantan- serawak dimana banyak penduduk Kalimantan lebih memilih menjadi masyarakat Malaysia ketimbang mempertahankan kewarganegaraan mereka, hal ini di sebabkan keadaan faktor ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT), saat ini terdapat 183 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia, 70

tertinggal di 27 provinsi minus Jambi, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Barat, yaitu 46 di Sumatra, sembilan di Jawa, 16 di Kalimantan, 34 di Sulawesi, 28 di Bali dan Nusa Tenggara, 15 di Maluku dan Maluku Utara, serta 35 di Papua dan Papua Barat. Totalnya, 128 kabupaten daerah tertinggal atau sekitar 70 persen di kawasan timur. Provinsi yang jumlah kabupaten daerah tertinggalnya terbanyak ialah Papua, memiliki 27 daerah tertinggal, Nusa Tenggara Timur 20, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah masing-masing 10, Sulawesi Tenggara sembilan, serta Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Barat masing-masing delapan.

Keadaan ini memicu banyak konflik sosial di setiap lapisan masyarakat, pelanggaran HAM di bidang ekonomi ini menimbulkan banyak permasalahan HAM. Jurang perbedaan antara kaya dan miskin memicu konflik sosial yang berujung pada amuk massa. Demo yang kerap terjadi pada perusahaan-perusahaan asing kerap menimbulkan konflik dan pembantaian. Tidak hanya pada lapisan masyarakat di tingkat birokrasi pemerintah juga banyak terjadi penyelewengan kebijakan, penyuapan terhadap setiap putusan yang akan diambil, dan manipulasi data bertujuan mengelabui khalayak umum. Masalah yang terjadi semakin menumpuk dan komplis dalam penyelesaiannya, pengambilan keputusan terhadap

1.1.1. Di bawah pemerintahan dan tidak memiliki salah satu pihak yang